



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 10480-10491

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Collaborative Governance dalam Upaya Mengoptimalkan Pemanfaatan Pasar Plaza Bangkinang Kabupaten Kampar

Nursayfni Atikah^{1✉}, Meyzi Heriyanto², Nur Laila Meilani³

Pascasarjana Administrasi Publik, Universitas Riau

Email: nursayfniatikah@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi kurangnya optimalisasi jual beli pedagang yang berada didalam plaza bangkinang. Sehingga beberapa pedagang yang berjualan di dalam plaza bangkinang memilih untuk berjualan di luar plaza bangkinang. Pedagang kaki lima belum di tidak dan masih melakukan aktifitas jual beli di sekitaran plaza bangkinang dan memakan bahun jalan sehingga membuat kemacetan di karenakan ada yang membuat lapak untuk berjualan di pinggir jalan . Masih belum melakukan sosialisasi kenaikan service charge kepada pedagang dan pedagang banyak yang tutup.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyelenggaraan *Collaborative Governance* dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan pasar plaza Bangkinang Kabupaten Kampar serta Mengidentifikasi faktor penghambat/mendukung penyelenggaraan *Collaborative Governance* dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan pasar plaza Bangkinang Kabupaten Kampar. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif dengan Pendekatan induktif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menetapkan informan penelitian sebagai sumber informasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui permasalahan penelitian secara mendalam. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah 8 orang.

Hasil penelitian menemukan bahwa Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Collaborative Governance Dalam Upaya mengoptimalkan pemanfaatan plaza bangkinang kabupaten kampar tidak berjalan efektif. Hal ini berdasarkan Teori yang dikemukakan oleh Ansell and Gash.1) *Face to face dialogue* dialog tatap muka sudah berjalan dengan cukup baik karena para stakeholders memiliki kepentingan dan visi bersama ingin dicapai, 2) *Trust building* dalam membangun kepercayaan satu sama lain tanggung jawab sesuai aturan agar munculnya kepercayaan satu sama lain dan ketika ada kendala mereka melakukan rapat koordinasi. 3) *Commitment to process* memiliki tujuan yang sama dan harapan yang sama juga walaupun memiliki pemikiran yang berbeda, 4) *Share understanding* dalam

menjalankan tugas pokok masing-masing, menerima saran dan saling berbagi pemahaman, 5) *Intermediate outcomes* tidak berjalan dengan baik. Faktor penghambatnya yaitu keterbatasan Sumber daya Manusia serta keterbatasan Anggaran.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, mengoptimalkan, pemanfaatan plaza bangkinang.

Abstract

This research is motivated by the lack of optimizing the buying and selling of traders who are in the Bangkinang Plaza. So that some traders who sell in the Bangkinang Plaza choose to sell outside the Bangkinang Plaza. The street vendors have not been stopped and are still carrying out buying and selling activities around the Bangkinang Plaza and eating up the roadside, causing congestion because someone is making stalls to sell on the roadside. Still haven't socialized the increase in service charge to traders and many traders are closed.

The purpose of this study was to analyze the implementation of Collaborative Governance in an effort to optimize the utilization of the Bangkinang plaza market in Kampar Regency and to identify the inhibiting/supporting factors for the implementation of Collaborative Governance in an effort to optimize the utilization of the Bangkinang plaza market in Kampar Regency. The type of research chosen is qualitative research with an inductive approach that is descriptive in nature. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation. This research determines research informants as a source of information to obtain the required data. Informants in this study are people who know the research problems in depth. The number of informants in this study were 8 people.

The results of the study found that the results of this study explained that Collaborative Governance in an effort to optimize the utilization of the Bangkinang Plaza in Kampar Regency was not running effectively. This is based on the theory put forward by Ansell and Gash. 1) Face-to-face dialogue face-to-face dialogue has been going quite well because stakeholders have interests and a common vision to be achieved, 2) Trust building in building trust in each other is responsibility according to the rules so that there is trust in one another and when there are obstacles they hold a coordination meeting. 3) Commitment to process has the same goals and the same hopes even though they have different thoughts, 4) Share understanding in carrying out their respective main tasks, receive suggestions and share understanding, 5) Intermediate outcomes do not go well. The inhibiting factors are limited human resources and limited budget.

Keywords: , Collaborative Governance, optimize, bangkinang plaza utilization

PENDAHULUAN

Pasar tradisional memegang peranan penting dalam menggerakkan ekonomi rakyat di seluruh negeri. Menurut data Badan Pusat Statistik Pasar tradisional di seluruh Indonesia yang mencapai lebih dari 15.657 unit dan mampu menampung lebih dari 12.625.000 pedagang sebenarnya dapat menjadi kekuatan ekonomi negara. Roda perekonomian kerakyatan dapat terus bergulir jika pasar-pasar tradisional yang memiliki sejarah panjang dikelola dengan baik dan tetap lestari. Adapun pasar se-kabupaten Kampar hanya ada 5 pasar yang di kelola oleh Pemerintah kabupaten Kampar di antaranya kecamatan bangkinang kota sebanyak 1.293 kios dan 12 unit los, kecamatan Kampar 120 kios dan 14 los, kecamatan Kampar kiri hilir 5 unit kios, kecamatan kampar kiri 28 unit kois dan 10 unit los dan kecamatan XIII Koto Kampar sebanyak 14 Unit kios dan 65 unit los

Pasar Plaza Bangkinang menyediakan berbagai fasilitas yang tujuannya dapat membuat pembeli betah dan nyaman berbelanja, didukung oleh adanya berbagai barang sebagai kebutuhan konsumen. Dalam hal ini melibatkan kerjasama antara pemerintahan Kabupaten Kampar dengan PT. Makmur Permata Putra, yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS). Bentuk Kerjasama yang dilaksanakan pemerintah kabupaten Kampar dengan PT. Makmur Permata Putra menggunakan Bulid Operate Transfer (BOT) atau di sebut dengan Bangun Guna Serah yang maksudnya pihak kedua (pihak PT) memanfaatkan tanah fasilitas milik pihak pertama (PEMDA) dengan bertanggung jawab membangun dan membiayai proyek, kemudian memasarkan, mengoperasikan dan memeliharanya dan setelah jangka waktu perjanjian kerja sama berakhir seluruh asset harus diserahkan kepada pihak pertama dan sepenuhnya menjadi milik pihak pertama tanpa ganti rugi apapun.

Plaza Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota, dimana pengelola pasar belum optimal membuat Plaza Bangkinang menjadi pusat belanja yang nyaman bagi konsumen/pembeli. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti; aspirasi masyarakat pedagang dalam khusus Plaza Bangkinang belum sepenuhnya ditindak lanjuti secara optimal, banyaknya pedagang yang menggelar dagangan mereka di luar gedung Plaza Bangkinang. Membuat los tersendiri di halaman Plaza Bangkinang sehingga membuat aktivitas jalan di sekitaran Plaza Bangkinang Menjadi macet dan hampir tidak bisa di lalui oleh kendaraan. Hal ini terjadi karena akses ke lantai atas Gedung plaza bangkinang sangat sempit sehingga sangat menyulitkan pedagang maupun pembeli dan pihak plaza menaikkan tarif servis tanpa sepengetahuan pedagang. Hal seperti ini membuat pemanfaatan pasar sebagai tempat bertransaksi antara penjual dan pembeli belum

optimal.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar dan Pengelola Plaza Bangkinang PT. Makmur Permata Putra perlu lebih mengoptimalkan pengelolaan pasar sebagai pusat belanja bagi masyarakat terkait Kerjasama pemerintah dengan pihak plaza

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif yaitu, penelitian sebuah gejala secara menyeluruh (holistik-kontektual) yang diperoleh melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan seorang peneliti sebagai instrument kunci. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2009) yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut Lofland dalam Moloeng (2018) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata – kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain – lain. Jenis data yakni data primer dan sekunder

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan sebuah data, mengorganisasikan data, memilih data menjadi satu satuan yang dapat dikelola, dan menemukan apa yang penting dan membuat sebuah keputusan yang diceritakan kepada orang lain. Menurut Miles dan Huberman ada empat serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam analisis data yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data (*reduction data*), penyajian data (*data display*) dan verifikasi (*conclusion drawing*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Collaborative Governance dalam Upaya Mengoptimalkan Pemanfaatan Pasar Plaza Bangkinang Kabupaten Kampar berfokus pada *Face to face dialogue, Trust building, commitment to process, share understanding, intermediate outcomes*. Istilah *collaborative governance* merupakan carapengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell dan Gash, 2008:41).

Collaborative governance adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung Pemangku kepentingan “non-state” di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan

deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau aset (Ansell dan Gash, 2008)

Governance menimbulkan varian baru dalam konsep *governance* antara lain *good governance* (UNDP, 2014) yang memberi penekanan pada penerapan prinsip-prinsip *governance* yang baik, *collaborative governance* (Agranoff, 2006) yang menonjolkan karakteristik proses kerjasama diantara ketiga pilarnya, *network governance* (Provan and P. Kenis, 2008) yang memberi penekanan pada jejaring yang harus dijalin untuk terwujudnya *governance*, *partnership governance* (Munro, Roberts, and C. Skelcher, 2008) yang mengharuskan adanya kemitraan dalam jangka panjang, *new public governance* (Osborne, 2010) yang memberi penekanan pada kritik pada NPM, dan *sound governance* (Farazmand, 2004) yang mengkritik bahkan membantah konsep *good governance*.

Beberapa ahli lain menggambarkan *Collaborative Governance* sebagai interagency koordinasi sebagai pemerintahan kolaboratif. Smith (1998) misalnya, berpendapat bahwa *collaboratives* di-volve representasi oleh kelompok-kelompok kunci kepentingan. Connick, Sarah dan Innes (2003) mendefinisikan kolaboratif pemerintahan sebagai wakilwakil dari semua kepentingan yang relevan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Reilly (1998) menggambarkan upaya-upaya kolaboratif sebagai jenis pemecahan masalah yang melibatkan instansi pemerintah dan warga yang peduli

Face to face Dialogue

Pada tahap dialog tatap muka para stakeholders yang terlibat diharapkan dapat membangun sebuah kepercayaan, rasa saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses dari sebuah kolaborasi yang akan direncanakan dan dilaksanakan (Ansell and Gash, 2008:78). Adanya dialog tatap muka merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam sebuah kolaborasi tanpa adanya dialog tatap muka pada awal proses kolaborasi ditakutkan akan dapat memunculkan sebuah gejolak dalam proses berjalannya suatu kolaborasi.

Proses kolaborasi ini adalah Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar dengan pihak PT. Makmur Permata Putra untuk mengoptimalkan pemanfaatan Plaza Bangkinang. Sebelum melakukan peninjauan ulang terkait Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan pihak PT. Makmur Permata Putra, masyarakat melakukan aksi demonstrasi terhadap Pihak PT. Makmur Permata Putra di lokasi Plaza Bangkinang.

PT. Makmur Permata Putra kurang berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar untuk melakukan kenaikan harga *service charged* dan

pembayaran melalui *Virtual Account* yang telah di distribusikan secara sepihak oleh PT. Makmur Permata Putra. Seharusnya pihak PT. Makmur Permata Putra melakukan musyawarah kepada pedagang yang berada di dalam plaza bangkinang mengenai kenaikan harga *service charged* dan pembayaran melalui *Virtual Account* sehingga tidak terjadi demonstrasi yang di lakukan oleh para pedagang yang berada di dalam plaza bangkinang.

PT. Makmur Permata Putra tidak melakukan penyetoran royalty terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang telah disepakati sejak tahun 2010 dimana pada tahun tersebut sudah dilakukan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah daerah Kabupaten Kampar dengan PT. Makmur Permata Putra dengan nomor : 530/BUPATI-KPR/2010/01 / Nomor : 001/MPP/I/2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Kerja Sama Bangun Guna Serah (BGS) Pasar Inpres bangkinang kemudian pada bulan juli 2010 dilakukan kembali Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah daerah Kabupaten Kampar dengan PT. Makmur Permata Putra dengan nomor : 060/DPKP/2010/191 / Nomor : 002/MPP/VII/2010 tanggal 07 Juli 2010 tentang Addendum Kerja Sama Bangun Serah (BGS) Pasar Inpres bangkinang.

Kontribusi terhadap Pemerintah Kabupaten Kampar mulai berjalan tanggal 06 Februari 2014 (Lounching Plaza Bangkinang), namun di tahun 2015 pihak Plaza Bangkinang hanya menyetor 50% dari 100% yang tertera didalam perjanjian kerjasama tersebut, sehingga Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar mengeluarkan surat Dinas Perindustrian, perdagangan dan Pasar Nomor : 511.2/Perindagpas-PSR/98, tanggal 16 maret 2015 perihal kontribusi, surat kedua dari Dinas Perindustrian, perdagangan dan Pasar Nomor : 511.2/Perindagpas-PSR/655, tanggal 01 Oktober 2015 perihal kontribusi, surat ketiga Dinas Perindustrian, perdagangan dan Pasar Nomor : 511.2/Perindagpas-PSR/775, tanggal 16 November 2015 perihal kontribusi, dan surat keempat Dinas Perindustrian, perdagangan dan Pasar Nomor : 511.2/Perindagpas-PSR/802, tanggal 21 desember 2015 perihal kontribusi.

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar dengan PT. Makmur Permata Putra sudah berusaha semaksimal mungkin dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan plaza bangkinang, namun banyak kondisi yang membuat Plaza Bangkinang belum berjalan dengan maksimal, maka kepala sekolah sedang berupaya dalam melakukan kajian lebih dalam mengenai hal tersebut. Dapat dipahami bahwa dialog tatap muka dari Collaborative Governance menjadi satu arah sehingga paraStakeholders memiliki kepentingan dan visi bersama yang ingin dicapai, salingmenghormati dalam pelaksanaan tugas, inilah yang menyebabkan proseskolaborasi menjadi lebih baik dengan adanya dialog tatap muka.

Trust Building

Buruknya rasa percaya antar stakeholder memang merupakan hal yang lumrah di awal proses kolaborasi. Kolaborasi memang bukan semata tentang negoisasi antar stakeholder, namun lebih dari itu merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya. Membangun kepercayaan perlu dilakukan sesegera mungkin ketika proses kolaborasi pertama dilakukan. Hal ini diupayakan agar para stakeholder tidak mengalami egosentrisme antar institusi. Oleh karenanya, dalam membangun kepercayaan ini, diperlukan pemimpin yang mampu menyadari akan pentingnya kolaborasi. Membangun kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari proses dialog. Para pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan diantara para pemangku kepentingan. Proses dalam membangun kepercayaan merupakan proses jangka panjang yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen yang tinggi.

Membangun sebuah kolaborasi sangat penting pihak terkait membangun kepercayaan satu dengan yang lain terutama dalam melakukan perjanjian kerjasama antara pemerintah kabupaten Kampar dengan PT. makmur Permata Putra. melakukan rapat koordinasi sangat penting dilakukan agar saling membangun kepercayaan satu sama lain, supaya pengoptimalan pemanfaatan Plaza Bangkiang menjadi lancar sehingga kolaborasi antara Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar dengan PT. Makmur Permata Putra berjalan dengan baik sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Commitment

Adanya kondisi saling ketergantungan yang tinggi diantara para pemangku kepentingan kemungkinan akan meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi. Perlu ditekankan bahwa berkolaborasi bukanlah kesepakatan satu kali akan tetapi merupakan sebuah proses kegiatan kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Merupakan kesepakatan untuk melaksanakan suatu proses guna mencapai tujuan yang diinginkan, memiliki komitmen yang sama berarti adanya inisiatif dari setiap pemangku kepentingan akan tugas tertentu dalam melaksanakan kegiatan kolaborasi, semua pemangku kepentingan akan sadar tugas yang menjadi bagiannya itu

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dan Pihak PT. Makmur Permata Putra memiliki tujuan yang sama dalam proses upaya mengoptimalkan pemanfaatan Plaza Bangkinang agar terciptanya komitmen dalam pemanfaatan Plaza bangkinang menjadi baik kedepannya. pemerintah daerah kabupaten Kampar dengan PT. Makmur Permata Putra sangat ketergantungan satu sama lain, di karenakan telah berkolaborasi dan memiliki tujuan yang sama dalam mengoptimalkan plaza bangkinang

Pada saat berkolaborasi komitmen sangatlah penting bagi kedua belah pihak, dikarenakan komitmen dapat berpengaruh terhadap kepercayaan antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan PT. Makmur Permata Putra yang memiliki tujuan yang sama dalam proses mengoptimalkan dan pemanfaatan Plaza Bangkinang agar terciptanya kepercayaan yang satu dengan yang lain dan kolaborasi menjadi lebih baik kedepannya. PT. Makmur Permata Putra yang sudah membuat komitmen dari awal tidak menyanggupi komitmen tersebut dikarenakan plaza bangkinang tidak ramai kembali dan tingkat hunian nya semakin menurun sehingga penurunan omzet bagi pihak plaza bangkinang atau PT. Makmur Permata Putra, dan banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan dalam radius kurang dari 200 meter, kemudian dibentuk tim yustisi untuk melakukan peninjauan ulang Mou yang telah disepakati bersama

Share Under Standing

Pemahaman bersama melahirkan kepercayaan yang dapat membuat stakeholder mengapresiasi perbedaan yang ada dari stakeholder lain. "Mutual understanding" tidak sama dengan kata "shared understanding" yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash. Shared understanding adalah kondisi dimana semua stakeholders menyetujui tujuan-tujuan dan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Sedangkan, mutual understanding lebih ke arah pemahaman bersama yang dimaksud untuk membuat sesama stakeholder saling mengerti dan menghargai posisi dan kepentingan stakeholder lain bahkan ketika stakeholder tersebut tidak sependapat. Pemahaman bersama menuju pada kualitas interaksi interpersonal individu dan organisasi. Pembentukan pemahaman bersama sering dipengaruhi oleh kepercayaan yang telah terbentuk di dalam kolaborasi.

Pada titik tertentu, para pemangku kepentingan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat dicapai. Pemahaman bersama ini dapat berupa adanya tujuan bersama yang jelas, definisi masalah yang dihadapi bersama juga sudah jelas dan pemahaman bersama mengenai nilai yang akan dicapai dalam berkolaborasi (Ansell and Gash 2008: 78). Proses shared understanding telah berjalan dengan baik, dimana masing-masing stakeholders sudah memiliki pemahaman yang sama atau selaras. Para stakeholders telah memiliki suatu pemahaman dan tujuan yang sama dari collaborative governance yang mereka jalankan. Tujuan tersebut adalah sama-sama berusaha untuk melayani dan membantu masyarakat dengan sebaik-baiknya dalam rangka menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi utamanya pada permasalahan pengoptimalan Plaza Bangkinang dan pemanfaatan gedung Plaza Bangkinang.

Berjalannya proses *share understanding* ini tidak akan pernah lepas dari peran pada proses *face to face dialogue* yang dilaksanakan oleh para *stakeholders*. Dengan *face to face dialogue* yang berjalan dengan baik akan mampu mengantisipasi kesalahpahaman yang berujung pada perbedaan persepsi. Proses *shared understanding* ini sendiri memudahkan dalam merencanakan langkah apa yang akan diambil oleh para *stakeholders*. PT. Makmur Permata Putra dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar memiliki tujuan yang sama dan memiliki prinsip dan tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan, dari pihak PT. Makmur Permata Putra dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar juga sering melakukan rapat dan melakukan *survey* di lapangan saling berbagi pengalaman dan pemahaman satu sama lain tentang optimalisasi pemanfaatan Plaza Bangkinang.

Permasalahan pemerintah daerah kabupaten Kampar dengan pihak PT. Makmur Pertama Putra mengadakan rapat tentang tingkat hunian plaza bangkinang semakin menurun dan peninjauan ulang perjanjian kerjasama yang telah dilakukan pada tahun 2010, sehingga dapat mengoptimalkan kembali plaza bangkinang yang pada saat ini sedang mati suri, akan tetapi pada rapat yang telah diselenggarakan tersebut menuaikan hasil yang baik agar kolaborasi ini tetap berjalan dengan lancar dan memberikan pemahaman yang baik terhadap yang kedua belah pihak, maka pemerintah daerah kabupaten kampar dan PT. Makmur PErmata Putra memiliki tujuan yang sama dalam mengoptimalkan pemanfaatan plaza bangkinang

Intermediate Outcome

Pada tahap ini diharapkan dapat muncul sebuah kesepakatan terhadap hasil akhir yang ingin dicapai dalam suatu kolaborasi, perancangan dan penyetusan sebuah hasil akhir diharapkan dapat membangun rasa kepercayaan serta komitmen untuk dapat menjalankan tupoksi pada masing-masing *stakeholders* guna menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi.

Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk *output* atau keluaran yang nyata. Hal ini merupakan hasil proses yang kritis dan esensial dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi keberhasilan suatu kolaborasi. *Intermediate outcomes* ini muncul apabila tujuan yang mungkin dan memberikan keuntungan dari kolaborasi yang mana secara relative konkrit dan ketika "*small wins*" dari suatu kolaborasi dapat dimungkinkan terjadi sehingga dapat menjadi pendorong dalam membangun kepercayaan dan komitmen bersama para pemangku kepentingan (Ansell and Gash 2008 : 78) Proses kolaborasi yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dengan

PT. Makmur Permata Putra berjalan dengan baik karena tugas yang dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada sehingga tidak terjadi kendala namun jika adapun terjadi kendala maka dapat diselesaikan dengan mengambil keputusan bersama.

Pedagangan yang berada di dalam plaza bangkinang menginginkan kenaikan service charge di batalkan dan kembali ke harga service charge sebelum di lakukan kenaikan. Sementara itu dari pihak plaza tidak bisa melakukan permintaan dari pedagang tersebut di karenakan kalau service charge nya tidak di naikan maka fasilitas yang ada di dalam plaza bangkinang tidak dapat di benarkan. Pedagang menuntut janji pihak plaza bangkinang untuk meramaikan kembali plaza bangkinang ini, di kaenakan sudah lama plaza bangkinang ini tidak optimal dan tingkat huniannya mulai berkurang dan sudah ada yang tutup permanen dikarenakan plaza tidak lagi ramai sehingga pedagang yang berjualan di dalam plaza bangkinang mau tidak mau harus membayar service charge yang sudah dilakukan kenaikan. Dan pedagang juga menolai pembayaran service charge melalui virtual account yang biasanya dibayar melalui pihak plaza sekarang tidak lagi, para pedagang menolak dikarenakan pembayaran melalui Virtual Account ini dirasa ukup sulit bagi para pedagang yang berjualan di dalam plaza bgkinang. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar yang mengetahui tentang pedagang melakukan aksi demonstrasi terhadap pihak plaza bangkinang.

Faktor Penghambat *Collaborative Governance* Dalam Upaya Mengoptimalkan Pemanfaatan Plaza Bangkinang Kabupaten Kampar

Collaborative governance dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan plaza bangkinang yang suah berjalan 9 tahun tidak menghasil kolaborasi yang bagus. Masih ada beberapa hambatan yang bisa menyebabkan terhambatnya upaya mengoptimalkan pemanfaatn plaza bangkinang. pedagangan kebanyakan menunggak dalam pembayaran sewa los/kios di dalam plaza bangkinang, kemudian pihak plaza bangkinang harus mengundang dan merangkul tenant-tenant. pemerintah daerah kabupaten Kampar masih kekurangan personil untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima yang ada di sekitara plaza bangkinang. Anggaran merupakan program kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang. Setiap program akan dinyatakan secara rinci biaya yang dibutuhkan. Biaya tersebut digunakan oleh pemerintah untuk merencanakan dan mengendalikan suatu kegiatan. Anggaran juga merupakan pernyataan mengenai sistemasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Dengan minimnya anggaran yang tersedia dinas terkait untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima menjadi tidak optimal sehingga banyak pedagang yang berjualan di dalam plaza

bangkinang memilih untuk berjualan di luar plaza bangkinang.

SIMPULAN

Hasil riset menemukan Proses face to face dialog menyimpulkan bahwa proses kolaborasi dialog tatap muka antara Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK kabupaten Kampar dengan PT. Makmur Permata Putra sudah berjalan dengan cukup baik karena para stakeholders memiliki kepentingan dan visi bersama ingin dicapai, saling menghormati dalam pelaksanaan tugas. Dalam proses trust building menyimpulkan bahwa antara Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK kabupaten Kampar dengan PT. Makmur Permata Putra dalam membangun kepercayaan satu sama lain mereka memiliki tugas masing-masing dan tanggung jawab sesuai aturan agar munculnya kepercayaan satu sama lain dan ketika ada kendala mereka melakukan rapat koordinasi. Proses *commitment to process* menyimpulkan antara Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK kabupaten Kampar dengan PT. Makmur Permata Putra memiliki tujuan yang sama dan harapan yang sama juga walaupun memiliki pemikiran yang berbeda.

Proses *share understanding* antara Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK kabupaten Kampar dengan PT. Makmur Permata Putra mempunyai prinsip dalam menjalankan tugas pokok masing-masing, menerima saran sering dan saling berbagi pemahaman. *Intermediate outcomes* atau hasil sementara dalam proses kolaborasi antara Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK kabupaten Kampar dengan PT. Makmur Permata Putra menyimpulkan masih belum berjalan dengan baik karena ada kendala seperti pemerintah daerah kabupaten Kampar tidak melakukan Tindakan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di sekitaran plaza bangkinang dan pada saat penertiban dilakukan disitu ada unsur politik sehingga penertiban pedagang kaki lima tidak berjalan dengan baik dan lancar, kemudian pihak PT. Makmur Permata Putra tidak melakukan pembayaran royalty terhadap pemerintah daerah kabupaten Kampar sehingga banyak tunggakan yang dimiliki oleh PT. Makmur Permata Putra sehingga Plaza bangkinang belum optimal sampai saat ini.

Hasil riset menemukan bahwa faktor-faktor yang menghambat dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan plaza bangkinang adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia, dan keterbatasan Anggaran dalam melaksanakan mengoptimalkan pemanfaatan plaza bangkinang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Farazmand, "Globalization and Governance: A Theoretical Analysis," *Sound Gov. policy Adm. Innov.*, p. 330, 2004
- Ansell, Chris and Gash, Alison. 2008. "Collaborative Governance in Theory and Practice (October 2008). *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 18, Issue 4, pp. 543-571, 2008, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1271032> or <http://dx.doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Connick, Sarah, and Judith Innes. 2003. Outcomes of collaborative water policy making: Applying complexity thinking to evaluation. *Journal of Environmental Planning and Management* 46:177-97
- K. G. Provan and P. Kenis, "Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness," *J. Public Adm. Res. Theory*, vol. 18, no. 2, pp. 229-252, 2008
- H. Munro, M. Roberts, and C. Skelcher, "Partnership governance and democratic effectiveness: Community leaders and public managers as dual intermediaries," *Public Policy Adm.*, vol. 23, no. 1, pp. 61-79, 2008
- Moloeng. 2018. *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- R. Agranoff, "Inside collaborative networks: Ten lessons for public managers," *Public Adm. Rev.*, vol. 66, no. SUPPL. 1, pp. 56-65, 2006
- Reilly, Thom. 1998. Communities in conflict: Resolving differences through collaborative efforts in environmental planning and human service delivery. *Journal of Sociology and Welfare* 25: 115-42
- S. P. Osborne, *Public-private partnerships and public governance challenges*, First. LONDON AND NEW YORK: Routledge Taylor & Francis Group, 2010
- Smith, Susan., 1998, Collaborative approaches to Pacific Northwest fisheries management: The salmon experience. *Willamette Journal of International Law and Dispute Resolution* 6:29
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta Undp, "Governance for Sustainable Development Integrating Governance in the Post-2015 Development Framework," no. March 2014, 2014